

## **BAB II**

### **TINJAUAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah**

Menurut Gemilang & Pramita, (2021) tingkat ketergantungan daerah menggambarkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan daerahnya. Sedangkan, menurut R. Aulia & Rahmawaty, (2020) tingkat ketergantungan keuangan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung kepada penerimaan dari pemerintah pusat yang tercermin dari besarnya dana perimbangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Mahmudi (2019:140) mendefinisikan tingkat ketergantungan keuangan daerah sebagai rasio antara pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi perbandingan rasio tersebut, maka semakin besar juga tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan jika tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah gambaran seberapa besar pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat melalui pendapatan tranfer yang diterimanya dalam membiayai pembangunan daerah, dimana tingkat ketergantungan keuangan daerah tersebut dapat tercermin dengan membandingkan antara pendapatan transfer dengan pendapatan daerah. Dengan diberikannya dana

transfer dari pemerintah pusat, diharapkan dapat dialokasikan untuk proses operasional dan investasi pada pemerintah daerah.

### **2.1.1.2 Komponen Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah ini terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **2.1.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **1. Pajak Daerah**

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari pajak yang dipungut oleh

pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Adapun pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi yaitu:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Alat Berat
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- e. Pajak Air Permukaan
- f. Pajak Rokok
- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan

Sementara itu, untuk pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Air Tanah
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
- g. Pajak Sarang Burung Walet,
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah ini terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum, adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun jenis pelayanan yang dimaksud yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas.
  - b. Retribusi Jasa Usaha, adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
    - 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
    - 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang akan dipertanggungjawabkan sendiri karena dari pengelolaan

kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c. Hasil kerja sama daerah
- d. Jasa giro
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir
- f. Pendapatan Bungan
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan

uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah

- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- k. Pendapatan denda pajak daerah
- l. Pendapatan denda retribusi daerah
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- n. Pendapatan dari pengembalian
- o. Pendapatan dari BLUD
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

#### **2.1.1.2.2 Pendapatan Transfer**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan dana transfer sebagai dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah, guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun komponen dari pendapatan transfer pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Transfer dari pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan, terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

2. Transfer dari pemerintah pusat lainnya, yang mencakup dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.
3. Transfer dari pemerintah provinsi, khususnya untuk pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dan bagi hasil lainnya.

#### **2.1.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah, selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

##### **1. Hibah**

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

##### **2. Dana darurat**

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

#### **2.1.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah**

Tingkat ketergantungan keuangan daerah merupakan kondisi dimana pemerintah daerah belum mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, sehingga masih bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat. Kondisi ini merupakan kebalikan dari konsep kemandirian keuangan daerah. Menurut Tangkilisan (2017:89), terdapat beberapa faktor yang secara tidak langsung dapat memengaruhi tingkat ketergantungan keuangan daerah, antara lain:

1. Rendahnya Potensi Ekonomi Daerah

Ketergantungan keuangan sangat berkaitan erat dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah. Apabila aktivitas ekonomi makro pada suatu daerah rendah, maka basis perpajakan daerah tersebut juga terbatas. Hal ini yang menyebabkan daerah tidak memiliki sumber pendanaan internal yang kuat, sehingga harus bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah

Tingkat ketergantungan keuangan daerah juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi perangkat daerah, khususnya Dinas Pendapatan Daerah. Kurangnya inovasi dalam pemanfaatan lembaga dan penggalan sumber-sumber

pendapatan baru dapat mengakibatkan penerimaan daerah tidak optimal, sehingga ketergantungan terhadap subsidi dari pusat tetap tinggi.

Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat ketergantungan keuangan daerah, yaitu:

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan faktor utama yang dapat memengaruhi tingkat ketergantungan keuangan daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerah. Dengan demikian, tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin rendah. Sebaliknya, PAD yang rendah dapat mengakibatkan daerah tidak mampu membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri, sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer akan semakin tinggi.

#### 2. Dana Transfer

Dana transfer sebagai dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah, guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tingginya proporsi dana transfer dalam struktur APBD, menggambarkan tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat.

##### **2.1.1.4 Pengukuran Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah**

Menurut Tullah *et al.*, (2019) tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diperoleh

oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat dengan total pendapatan daerah. Dengan demikian, semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin besar juga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Mahmudi (2019:140) menyatakan jika tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{Rasio TKKD} = \frac{\text{Total Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2. 1**

**Kriteria Tingkat Ketergantungan Daerah**

| <b>Tingkat Ketergantungan</b> | <b>Persentase (%)</b> | <b>Kategori</b>              |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sangat Tinggi                 | >75%                  | Ketergantungan Sangat Tinggi |
| Tinggi                        | 50% - 75%             | Ketergantungan Tinggi        |
| Sedang                        | 25% - 50%             | Ketergantungan Sedang        |
| Rendah                        | <25%                  | Ketergantungan Rendah        |

*Sumber: Halim, (2014)*

Menurut Tullah *et al.*, (2019) pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat, akan semakin mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah pusat, termasuk peraturan terkait ketepatan penyampaian laporan keuangan. Dana transfer diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah sebagai upaya pemerataan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan desentralisasi. Dengan demikian, pemerintah pusat memiliki kebijakan untuk memberikan sanksi berupa penundaan pemberian dana transfer kepada pemerintah daerah, apabila terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Hal tersebut akan mendorong penyusunan laporan keuangan daerah menjadi lebih tepat waktu dan mengurangi terjadinya *audit delay*.

## 2.1.2 *Government Size*

### 2.1.2.1 *Pengertian Government Size*

Menurut Tullah *et al.*, (2019) *government size* atau ukuran pemerintah daerah merupakan suatu gambaran terkait besar atau kecilnya suatu perusahaan atau daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Azhari & Sulardi, (2021) yang menyatakan ukuran pemerintah daerah sebagai besar kecilnya suatu daerah yang dapat diukur dari pendapatan daerah, total aset, jumlah SKPD, dan lainnya. Sedangkan, Azhara *et al.*, (2024) mendefinisikan ukuran pemerintah daerah sebagai gambaran mengenai seberapa luas pemerintahan sebuah daerah yang dapat diukur berdasarkan total aset yang dapat dilihat dalam neraca laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan jika ukuran pemerintah daerah merupakan besaran kapasitas suatu instansi pemerintah daerah yang dapat diukur secara kuantitatif melalui berbagai indikator seperti total aset yang dimiliki, jumlah pegawai, total pendapatan, dan tingkat produktivitasnya. Semakin besar satuan pada tiap jenis indikator ukuran tersebut, maka semakin besar juga ukuran pemerintah daerah (Azhari & Sulardi, 2021). Pemerintah daerah dengan skala besar akan memberikan peluang untuk dapat mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah, sehingga berdampak terhadap meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan mempermudah pemberian pelayanan yang lebih optimal dan memadai kepada masyarakat.

### 2.1.2.2 Pengukuran *Government Size*

Ukuran pemerintah daerah dapat diukur melalui beberapa cara. Menurut Banunaek *et al.*, (2022), ukuran pemerintah daerah dapat dinilai dari total aset, jumlah pegawai, total pendapatan, tingkat produktivitas pemerintah daerah. Berdasarkan cara tersebut, maka pengukuran ukuran pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{array}{llll}
 \text{Total Aset} & = & \text{Ukuran Pemerintah Daerah} & = & \text{Total Aset} \\
 \text{Jumlah Pegawai} & = & \text{Ukuran Pemerintah Daerah} & = & \text{Jumlah Pegawai} \\
 \text{Total Pendapatan} & = & \text{Ukuran Pemerintah Daerah} & = & \text{Total Pendapatan} \\
 \text{Tingkat Produktivitas} & = & \text{Ukuran Pemerintah Daerah} & = & \text{Tingkat Produktivitas}
 \end{array}$$

Berdasarkan beberapa pengukuran ukuran pemerintah daerah yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini penulis memilih indikator total aset sebagai dasar pengukuran ukuran pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa aset merupakan sumber daya ekonomi yang berada dalam penguasaan dan/atau kepemilikan pemerintah sebagai konsekuensi dari peristiwa masa lalu, yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial pada masa mendatang, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, aset juga dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan sumber daya yang dipertahankan karena alasan sejarah dan budaya.

Dengan demikian, total aset ini mencerminkan sumber daya potensial yang berguna untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah. Pemerintah yang mempunyai sumber daya atau aset yang lebih besar biasanya akan menyusun laporan keuangan dan melaporkan hasil laporan auditnya lebih lambat dibandingkan dengan pemerintah yang mempunyai aset lebih kecil. Hal tersebut karena pemerintah yang memiliki aset yang lebih besar cenderung memiliki jumlah transaksi yang lebih banyak, sehingga mengakibatkan penyampaian laporan keuangan kepada auditor menjadi lebih lama dan dapat menambah *audit delay* (Wafa & Nugraeni, 2018).

#### **2.1.2.3 Total Aset sebagai Indikator *Government Size***

Mahmudi (2019:93) mendefinisikan aset pemerintah daerah adalah semua bentuk kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah dan digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, penggunaan total aset sebagai indikator utama dalam mengukur *government size* karena aset mencerminkan skala ekonomi dan kondisi kekayaan riil yang dikelola oleh pemerintah daerah. Mahmudi (2019:93) juga mengungkapkan bahwa aset pemerintah daerah merupakan salah satu elemen krusial dalam neraca yang menggambarkan posisi kekayaan pemerintah daerah. Dengan demikian, melalui informasi aset tersebut para pengguna laporan keuangan dapat menilai perbandingan kekuatan ekonomi antar satu daerah dengan daerah yang lainnya, dimana pemerintah daerah yang memiliki aset lebih besar secara ekonomi dianggap lebih kaya dibandingkan daerah lainnya.

Kondisi kekayaan pemerintah daerah tersebut digambarkan dalam neraca berupa jumlah aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, aset tetap, dan aset lainnya yang dimiliki. Selain itu, menurut Sari (2016) penggunaan total aset sebagai indikator *government size* dianggap memiliki nilai yang lebih stabil dibandingkan dengan indikator lain seperti jumlah pegawai, total pendapatan, dan tingkat produktivitas suatu daerah. Aset juga memberikan gambaran terkait kelengkapan sarana dan prasarana publik serta potensi ekonomi suatu wilayah. Semakin besar total aset yang dilaporkan dalam neraca, maka semakin tinggi tingkat kompleksitas suatu daerah yang berdampak terhadap durasi penyelesaian audit. Dalam penelitian ini, *government size* dihitung dengan menggunakan total nilai aset yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.

#### **2.1.2.4 Karakteristik Aset Daerah**

Menurut Mahmudi (2019:92) menyatakan bahwa suatu objek atau pos untuk dapat disebut sebagai aset atau aktiva harus dapat memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Sumber daya ekonomi tersebut dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah
2. Sumber daya ekonomi tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa datang
3. Manfaat ekonomi di masa datang tersebut dapat diukur dengan tingkat kepastian yang masuk akal
4. Sumber daya ekonomi tersebut timbul karena transaksi masa lalu

### **2.1.3 Opini Audit**

#### **2.1.3.1 Pengertian Opini Audit**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan wewenang kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara. Ruang lingkup pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam menjalankan tugasnya, BPK melaksanakan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan. Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan. Sementara dalam Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa Opini audit adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Masdiantini & Erwati, (2016) opini audit merupakan suatu kesimpulan professional yang dikeluarkan oleh auditor dalam menyajikan laporan keuangan secara wajar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Fitriana & Hafini, (2023) yang mendefinisikan opini audit sebagai pendapat atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independent (BPK). Dengan demikian, melalui opini audit, pengguna laporan keuangan akan

mendapatkan keyakinan jika informasi keuangan yang tersaji dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan jika opini audit merupakan pendapat professional yang diberikan auditor setelah melakukan serangkaian proses audit untuk memastikan kesesuaian informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan diterbitkannya opini audit, auditor telah memberikan keyakinan bahwa informasi keuangan yang disajikan dapat diandalkan dan dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, opini audit berperan sebagai alat evaluasi keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, semakin baik opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka akan mempersingkat terjadinya *audit delay* (Tullah et al., 2019).

#### **2.1.3.2 Kriteria Pemberian Opini Audit**

Penentuan opini audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dilakukan secara subjektif, tetapi berdasarkan pada pengujian objektif terhadap bukti-bukti audit yang dikumpulkan selama proses pemeriksaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16 ayat (1), terdapat empat kriteria yang diberikan BPK sebagai dasar pemberian opini yaitu sebagai berikut:

### 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah harus disusun berdasarkan prinsip dan pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang saat ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual ini bermanfaat untuk memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Ketidaksesuaian yang bersifat material terhadap SAP akan menghambat pemerintah daerah untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

### 2. Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosures*)

Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*) mengandung arti bahwa laporan keuangan beserta catatannya memberikan informasi memadai yang dapat memengaruhi penggunaan, pemahaman, serta penafsirannya. Laporan keuangan harus memuat informasi secara cukup yang diharuskan oleh SAP. Pengungkapan yang tidak cukup dalam laporan keuangan dapat dianggap

sebagai penyimpangan dari SAP, sehingga apabila laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan tidak menjelaskan informasi yang diharuskan dalam SAP, maka auditor akan memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atau opini tidak wajar (TW).

### 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menilai apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara telah dilaksanakan sesuai aturan hukum, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan regulasi terkait, dimana temuan ketidakpatuhan yang material dapat memengaruhi opini yang diberikan oleh BPK. Namun, peraturan perundang-undangan yang memengaruhi opini BPK hanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyajian laporan keuangan. Dengan demikian, tidak semua penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi pertimbangan dalam pemberian opini BPK.

### 4. Efektivitas Pengendalian Intern

Efektivitas sistem pengendalian intern dibuktikan dengan penyajian informasi keuangan secara wajar dan cukup dalam laporan keuangan. Namun, keberadaan suatu sistem pengendalian intern tidak menjamin adanya penyajian laporan keuangan secara wajar dan cukup. Efektivitas sistem pengendalian intern hanya dapat ditentukan apabila sistem tersebut telah berjalan. Lemahnya suatu desain sistem akan sangat memengaruhi efektivitas sistem dalam menyajikan laporan keuangan secara cukup dan wajar yang dapat menjadi temuan audit, sehingga berdampak pada opini wajar dengan pengecualian

(WDP) atau bahkan tidak wajar (TW) jika memengaruhi kewajaran laporan keuangan.

### **2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Opini Audit**

Menurut Sitanala *et al.*, (2025) terdapat faktor-faktor dapat memengaruhi pemberian opini audit atas laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

#### **1. Independensi Auditor**

Menurut Sitanala *et al.*, (2025:40) independensi merupakan prinsip yang mengharuskan auditor untuk melakukan tugasnya tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, baik dari pihak yang diaudit maupun pihak eksternal lainnya. Independensi memastikan bahwa opini audit yang diberikan merupakan hasil pemeriksaan secara objektif, tidak bias, dan bebas dari pengaruh pribadi atau politik.

#### **2. Kualitas Bukti Audit**

Menurut Sitanala *et al.*, (2025:30) opini audit harus didasarkan pada penilaian yang objektif terhadap bukti-bukti yang relevan. Auditor harus mempertimbangkan semua bukti audit secara adil dan tidak memihak, dimana bukti audit didapatkan melalui pemeriksaan dokumen, hasil wawancara, hingga pengujian transaksi untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Apabila bukti tidak memadai, auditor tidak dapat memberikan opini yang akurat.

#### **3. Kompetensi Profesional Auditor**

Menurut Sitanala *et al.*, (2025:33) kompetensi profesional auditor mengharuskan auditor memiliki pengalaman pengetahuan, keterampilan, dan

kemampuan yang memadai dalam melakukan audit dengan standar yang tinggi. Oleh karena itu, dengan kompetensi yang memadai akan membantu dalam melakukan evaluasi yang mendalam terhadap temuan yang ada, sehingga dapat memberikan opini dan rekomendasi yang tepat berdasarkan hasil analisis yang cermat dan berbasis bukti.

#### 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal entitas bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur dan kebijakan internal telah dirancang dengan baik untuk mencegah terjadinya kecurangan. Menurut Sitanala *et al.*, (2025:44) apabila sistem pengendalian internal yang diterapkan suatu entitas lemah dan tidak efektif dalam mendeteksi atau mencegah kesalahan atau kecurangan, maka akan meningkatkan risiko pengendalian yang dapat menjadi temuan audit. Hal ini dapat memengaruhi opini yang akan diberikan auditor terhadap entitas.

##### 2.1.3.4 Jenis-Jenis Opini Audit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 11 ayat (1), terdapat empat jenis opini audit yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) diberikan ketika auditor meyakini bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan dapat dipercaya dan tidak menyesatkan penggunaannya.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) diberikan ketika auditor meyakini atas dasar auditnya ditemukan kesalahan dalam laporan keuangan yang memiliki nilai material tetapi tidak memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, auditor harus mengungkapkan alasan-alasan yang menjadi dasar pengecualiannya dalam satu atau beberapa paragraf tersendiri tepat diatas paragraf opini.

3. Opini Tidak Wajar (*adversed opinion*)

Opini tidak wajar (*adversed opinion*) diberikan ketika auditor meyakini bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material serta tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini tidak wajar (*adversed opinion*) diberikan auditor karena kesalahan yang terdapat dalam laporan keuangan bersifat material dan memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, sehingga informasi keuangan yang tersaji didalamnya tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

#### 4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*disclaimer of opinion*)

Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) terjadi ketika laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan ruang audit yang menyebabkan auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan opini audit.

#### 2.1.3.4 Pengukuran Opini Audit

Menurut pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebutkan bahwa opini audit adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Secara konseptual, opini audit merupakan variabel dengan skala ordinal yang merepresentasikan tingkatan kualitas laporan keuangan, mulai dari opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sampai pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*). Sejalan dengan pendapat menurut Sugiyono (2023:11) yang menyatakan bahwa data ordinal merupakan data kuantitatif yang berbentuk peringkat/rangking yang jaraknya tidak sama.

Dalam pengembangan model empiris data panel, terdapat kompleksitas dalam menginterpretasikan skala ordinal secara langsung karena model regresi linier, termasuk data panel mengasumsikan jarak antar variabel adalah sama dan bermakna, sementara data ordinal tidak memenuhi asumsi ini. Dengan demikian, dalam pengukuran variabel kualitatif, seperti opini audit ditransformasikan kedalam bentuk *dummy*. Pendekatan ini sejalan dengan literatur yang disusun oleh Basuki &

Prawoto (2016:304), dimana dalam studi kasus analisis datanya memperlakukan opini audit sebagai *dummy* untuk menyederhanakan interpretasi pengaruh atribut audit terhadap variabel dependen.

Penggunaan *dummy* untuk opini audit juga merupakan praktik yang lazim ditemukan dalam berbagai literatur internasional maupun nasional. Dalam penelitian yang dilakukan Khoufi & Khoufi (2018) mengoperasikan opini audit sebagai *dummy*, dimana *qualified opinion* diberi kode 1 dan *unqualified opinion* diberi kode 0. Sejalan dengan penelitian Fung *et al.*, (2016) yang melakukan *dummy* untuk *modified opinion* diberi kode 1 dan *unmodified opinion* diberi kode 0. Sementara itu, dalam penelitian Taufiq *et al.*, (2025) melakukan *dummy* untuk *unqualified opinion* diberi kode 1 dan *qualified opinion* diberi kode 0.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dijelaskan diatas, maka pengukuran opini audit dalam penelitian ini menggunakan *dummy*. Dalam pengukurannya yaitu apabila pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mendapat *modified opinion* (WDP, TW, TMP), maka diberi nilai 1. Sementara, apabila pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mendapat *unmodified opinion* (WTP dan WTP-PSH), maka diberi nilai 0.

#### **2.1.4 Audit Delay**

##### **2.1.4.1 Pengertian Audit Delay**

Menurut Koerniawan (2021:10), audit atau *auditing* merupakan proses pemeriksaan yang sistematis dan objektif atas laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut disajikan

secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Secara garis besar, proses audit dimulai sejak diterimanya penugasan audit hingga tahap penyampaian laporan audit. Dengan demikian, *audit delay* pada dasarnya merujuk pada keterlambatan penyelesaian audit laporan keuangan, yaitu kondisi ketika penerbitan laporan audit melebihi batas waktu yang seharusnya. Dalam konteks pelaporan keuangan, *audit delay* berkaitan erat dengan ketepatanwaktuan penyampaian informasi keuangan yang telah diaudit kepada para pengguna laporan.

Menurut Hanafi *et al.*, (2016), *audit delay* merupakan rentang waktu dari tanggal akhir tahun anggaran sampai tanggal diterbitkannya laporan audit oleh auditor. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mawardi & Lanjarsih (2019:60) yang mendefinisikan *audit delay* sebagai proses dilakukannya pemeriksaan atau audit yang membutuhkan waktu sehingga memunculkan jarak antara berakhirnya periode akuntansi hingga diterbitkannya laporan audit, rentang waktu antara berakhirnya tahun anggaran (31 Desember) hingga diterbitkannya laporan audit. Definisi tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu seperti pada penelitian Tullah *et al.*, (2019), Azhara *et al.*, (2024), dan Fitriana & Hafini, (2023) yang mendefinisikan *audit delay* sebagai selisih waktu yang dihitung mulai dari tanggal penutupan buku laporan keuangan hingga tanggal laporan audit ditandatangani.

Meskipun secara operasional terdapat perbedaan antara durasi pemeriksaan teknis lapangan dan *audit delay*, penelitian ini memandang *audit delay* sebagai sebuah kesatuan fenomena akuntabilitas. Dengan demikian, *audit delay* tidak hanya menggambarkan lamanya proses pemeriksaan oleh auditor, melainkan menunjukkan efisiensi total proses pelaporan keuangan yang dimulai dari kesiapan

entitas dalam menyajikan laporan hingga tahap penerbitan laporan opini audit oleh auditor.

Berdasarkan uraian tersebut, *audit delay* dalam penelitian ini dipahami sebagai rentang waktu akumulatif penyelesaian pelaporan hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk keperluan pengukuran empiris, *audit delay* diproksikan dengan selisih waktu sejak tanggal akhir tahun anggaran (31 Desember) sampai tanggal laporan audit diterbitkan dan ditandatangani oleh auditor. Penggunaan proksi ini dilakukan bertujuan untuk menangkap gambaran menyeluruh mengenai ketepatan waktu pelaporan, yang mencakup tahap persiapan laporan oleh pemerintah daerah dan tahap pemeriksaan oleh auditor.

Dengan demikian, semakin panjang *audit delay*, semakin besar potensi menurunnya relevansi informasi keuangan yang disajikan karena informasi yang disajikan tidak lagi mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna informasi LKPD. Oleh karena itu, ketepatwaktuan penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit menjadi penting sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

#### **2.1.4.2 Pengukuran Audit Delay**

Pengukuran *audit delay* dalam penelitian ini diukur secara kuantitatif dalam satuan hari. Menurut Mawardi & Lanjarsih (2019:60), *audit delay* dapat dihitung sebagai selisih jumlah hari antara tanggal akhir tahun anggaran, yaitu 31 Desember, dengan tanggal diterbitkan dan ditandatanganinya laporan audit. Penggunaan proksi ini konsisten dengan berbagai penelitian dalam sektor publik, seperti Tullah

*et al.*, (2019), Marlinda *et al.*, (2024), Karlina *et al.*, (2018) dan Gemilang & Pramita, (2021).

Meskipun, secara konseptual *audit delay* mencerminkan keterlambatan penyelesaian audit dibandingkan dengan batas waktu yang seharusnya dipenuhi, dalam penelitian empiris *audit delay* sering diproksikan dengan jarak waktu antara akhir tahun anggaran dan tanggal penerbitan laporan audit untuk menangkap gambaran ketepatanwaktu secara total. Dengan demikian, pengukuran *audit delay* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan Keuangan}$$

Menurut Dyer dan McHugh (1975) dalam Wijayanti & Effriyanti (2019) terdapat tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya, yaitu:

1. *Preliminary lag*

*Preliminary lag* merupakan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan hingga diterimanya laporan akhir preliminary oleh bursa. Dalam konteks sektor publik, hal ini berarti interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan daerah sampai pada tanggal penyerahan laporan keuangan tersebut kepada BPK.

2. *Auditor's signature lag*

*Auditor's signature lag* merupakan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan hingga tanggal ditandatanganinya laporan auditor.

### 3. Total lag

Total lag merupakan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan hingga tanggal dipublikasikannya tanggal penerimaan laporan.

#### 2.1.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay*

Menurut Koerniawan (2021) faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay* dapat ditinjau dari aspek proses audit dan kondisi entitas sebagai berikut:

##### 1. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan dasar bagi auditor untuk menentukan jenis dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Menurut Koerniawan (2021:122) apabila pengendalian internal suatu entitas dinilai lemah, maka kemungkinan terjadinya ketidakakuratan, kesalahan dan bahkan kecurangan dalam suatu entitas sangat besar, sehingga auditor harus berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, auditor harus memperluas pengujian dan mengumpulkan lebih banyak bukti audit yang berdampak pada bertambahnya beban kerja dan waktu penyelesaian audit.

##### 2. Ukuran dan Kompleksitas Organisasi

Ukuran dan juga kompleksitas organisasi secara signifikan memengaruhi volume transaksi yang harus diperiksa. Hal ini berdampak pada potensi keterlambatan entitas dalam menyusun laporan keuangan dan memengaruhi penentuan ukuran sampel dalam aspek teknis pemeriksaan oleh auditor. Menurut Koerniawan (2021:19) penentuan ukuran sampel didasarkan atas tingkat risiko dan pengendalian internal entitas tersebut. Semakin kompleks suatu organisasi, maka semakin besar sampel yang dibutuhkan untuk

memperoleh keyakinan memadai. Hal inilah yang dapat memperpanjang proses audit.

Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi *audit delay* dan telah banyak diuji oleh peneliti terdahulu, terutama dalam sektor publik. Menurut Wafa & Nugraeni, (2018) *audit delay* dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran pemerintah daerah, pengalaman pemerintah dalam menerapkan SAP, jumlah temuan audit, dan opini auditor atas laporan keuangan. Sementara itu, Afriani & Satyawan, (2023) menambahkan bahwa tipe pemerintah dan akuntabilitas kinerja juga menjadi faktor determinan yang dapat memengaruhi *audit delay*.

#### **2.1.4.4 Peraturan *Audit Delay***

Di Indonesia kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam menyampaikan pelaporan keuangan telah diatur dalam perundang-undangan. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa gubernur/bupati/walikota harus menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sementara itu, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga menyatakan bahwa laporan keuangan harus disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan. Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, BPK wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada DPRD paling lambat dua bulan setelah LKPD diterima oleh BPK, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

#### **2.1.4.5 Kajian Empiris**

Sejalan dengan uraian di atas, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merujuk pada penelitian sebelumnya antara lain:

1. Satiman *et al.*, (2024) dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah, Umur Pemerintah, dan Opini Audit terhadap *Audit Delay*. Hasil dari penelitian ini yaitu, secara simultan Ukuran Pemerintah, Umur Pemerintah, dan Opini Audit berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Sedangkan, secara parsial Ukuran Pemerintah dan Umur Pemerintah berpengaruh positif terhadap *Audit Delay*, namun Opini Audit tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*.
2. Tullah *et al.*, (2019) dengan judul Pengaruh Ukuran Daerah, Opini Audit, dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2016. Hasil dari penelitian ini yaitu, Ukuran Daerah tidak mempengaruhi *Audit Delay*. Sedangkan Opini Audit dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Audit Delay*.
3. Wafa & Nugraeni (2018) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu, Ukuran Pemerintah Daerah, Pengalaman Pemerintah

Menerapkan SAP, Jumlah Temuan Audit, dan Opini Audit berpengaruh terhadap *Audit Delay* baik secara parsial maupun simultan.

4. Azhara *et al.*, (2024) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. Hasil dari penelitian ini yaitu, Temuan Audit dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*. Sedangkan Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*.
5. Marlinda *et al.*, (2024) dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Kinerja, dan Opini Audit terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia (2019-2022). Hasil dari penelitian ini yaitu, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Akuntabilitas Kinerja berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Sedangkan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*.
6. Pambudi *et al.*, (2024) dengan judul Opini Audit, Nilai Aset, Dan Kemandirian Daerah Sebagai Determinan *Audit Delay*: Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia 2018-2021. Hasil dari penelitian ini yaitu, Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*. Sedangkan Opini audit dan Kemandirian Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap *Audit Delay*.
7. Fitriana & Hafini (2023) dengan judul Pengaruh *Leverage*, Opini Audit, APBD terhadap *Audit Delay* pada Kabupaten/Kota di Indonesia Bagian Tengah. Hasil dari penelitian ini yaitu, *Leverage* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap

*Audit Delay*, sedangkan Opini Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *Audit Delay*. Sementara itu, APBD tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *Audit Delay*.

8. Vanesha & Syofyan, (2020) dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah, Opini Audit, dan Terpilihnya Kembali Kepala Daerah Sebelumnya (Petahana) terhadap *Audit Delay* Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu, Ukuran Pemerintahan dan Petahana/*incumbent* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*. Sedangkan Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*.
9. Bawono *et al.*, (2023) dengan judul *Impact of Audit and Financial Factors on Impact of Audit and Financial Factors on Audit Report Lag: Evidences from Indonesian Audit Report Lag: Evidences from Indonesian Local Government*. Hasil dari penelitian ini yaitu, Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage* secara empiris mempengaruhi *Audit Delay*. Sedangkan *Auditor Switching* dan Probabilitas tidak memengaruhi *Audit Delay*.
10. Dheva & Setya (2023) dengan judul *The Effect of SKPD Complexity, Government Size, Budget Absorption, and Audit Opinion on Audit Delay in Central Java Province Government in 2017-2021*. Hasil dari penelitian ini yaitu, Kompleksitas SKPD, Penyerapan Anggaran, dan Opini Audit berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Sedangkan Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*.
11. Siahaan & Pakuan (2024) dengan judul *Local Government: Examining Factors Affecting Audit Report Lag*. Hasil dari penelitian ini yaitu, Opini Audit, Latar

Belakang Pendidikan, dan Pendidikan Profesional Berkelanjutan memiliki efek negatif yang signifikan terhadap *Audit Report Lag*. Sedangkan Temuan Audit dan Keterampilan Profesional tidak berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*.

12. Aprila & Siska (2017) dengan judul Pengaruh Opini Audit dan Kualitas Auditor terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu, Opini Audit dan Kecakapan Professional berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*. Sedangkan Latar Belakang Pendidikan Akuntansi tidak berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*.
13. Krisandri *et al.*, (2023) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020. Hasil dari penelitian ini yaitu, Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Opini Audit, dan *Leverage* tidak berdampak dan tidak signifikan pada *Audit Delay*. Sedangkan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berdampak dan tidak signifikan pada *Audit Delay*.
14. Petrisia *et al.*, (2024) dengan judul *The Phenomenon of Government Audit Delay in Indonesia*. Hasil dari penelitian ini yaitu, Secara parsial, Ukuran Pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap *Audit Delay*. Sedangkan Temuan Audit dan Jumlah Entitas Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap *Audit Delay*. Semetara itu, secara simultan Ukuran Pemerintah, Temuan Audit, dan Jumlah Entitas Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*.
15. Gemilang & Pramita (2021) dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Temuan

Audit terhadap *Audit Delay*. Hasil dari penelitian ini yaitu, Ukuran Pemerintah Daerah dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Sedangkan Opini Audit dan Temuan Audit berpengaruh positif terhadap *Audit Delay*.

16. Karlina *et al.*, (2018) dengan judul *Determinant Analysis Of Audit Report Lag In Regional Governments In Indonesia*. Hasil dari penelitian ini yaitu, Ukuran Pemerintah Daerah, Petahana, Opini Audit, dan DAK tidak mempengaruhi *Audit Report Lag*. Sedangkan Umur Pemerintah Daerah dan Temuan Audit memengaruhi *Audit Report Lag*.
17. Afriani & Satyawan (2023) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2016-2018. Hasil dari penelitian ini yaitu, Akuntabilitas Kinerja dan Tipe Pemerintahan menunjukkan pengaruh terhadap *Audit Delay*. Sedangkan Opini Auditor tidak ditemukan adanya pengaruh terhadap *Audit Delay*.
18. Ramadhani (2022) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Hasil dari penelitian ini yaitu, Ukuran Pemerintah, Tingkat Kemandirian Daerah, Temuan Audit, Terpilihnya Kembali Kepala Daerah, dan *Leverage* secara simultan tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Sementara itu, secara parsial Tingkat Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*, sedangkan Ukuran Pemerintah, Temuan Audit, Terpilihnya Kembali Kepala Daerah, dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

19. Aulia & Fithri (2025) dengan judul *Linking Accountability to Audit Delay: Role of Size dan Findings*. Hasil dari penelitian ini yaitu, Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja dan Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja. Sementara itu, Temuan Audit berpengaruh positif terhadap *Audit Delay*, sedangkan Ukuran Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay* serta Akuntabilitas Kinerja tidak memediasi hubungan antara Ukuran Pemerintah Daerah dan Temuan Audit terhadap *Audit Delay*.
20. Laili *et al.*, (2023) dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Auditor, dan Umur Perusahaan terhadap *Audit Delay*. Hasil dari penelitian ini yaitu Ukuran Perusahaan, Opini Auditor, dan Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

Tabel 2. 2

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu  
dengan Rencana Penelitian Penulis**

| No  | Peneliti,<br>Tahun,<br>Tempat<br>Penelitian                                                                              | Persamaan                                                                                        | Perbedaan                                                                       | Hasil<br>Penelitian                                                                                                                               | Sumber<br>Refensi                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                      | (3)                                                                                              | (4)                                                                             | (5)                                                                                                                                               | (6)                                                                                      |
| 1   | Satiman <i>et al.</i> , (2024). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Umur Pemerintah, dan Opini Audit terhadap <i>Audit Delay</i> | Variabel Independen: Ukuran Pemerintah, Opini Audit<br><br>Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i> | Variabel Independen: Umur Pemerintah<br><br>Periode Penelitian: Tahun 2018-2022 | Hasil penelitian menyatakan secara simultan Ukuran Pemerintah, Umur Pemerintah, dan Opini Audit berpengaruh positif terhadap <i>Audit Delay</i> . | Post Graduate Management Journal, Volume 4, Nomor 1, Juli 2024.<br><br>e-ISSN: 2798-3811 |

| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                       | (3)                                                                                                                                  | (4)                                                                                                                                                                                                     | (5)                                                                                                                                                                                                                          | (6)                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | Tempat Penelitian: Seluruh wilayah Provinsi di Indonesia                                                                                                                                                | Sedangkan, secara parsial Ukuran Pemerintah dan Umur Pemerintah berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> , namun Opini Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> .                                                  | p-ISSN: 2807-8934                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | Teknik Sampling: <i>Purposive Sampling</i>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
| 2   | Tullah <i>et al.</i> , (2019). Pengaruh Ukuran Daerah, Opini Audit, dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap <i>Audit Delay</i> pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia Periode 2015-2016 | Variabel Independen: Ukuran Daerah, Opini Audit, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah<br><br>Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i> | Periode Penelitian: Tahun 2015-2016<br><br>Tempat Penelitian: Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia<br><br>Teknik Sampling: <i>Purposive Sampling</i><br><br>Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian menyatakan Ukuran Daerah tidak mempengaruhi <i>Audit Delay</i> . Sedangkan, Opini Audit dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> . | Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan. Volume 12, Nomor 2, Agustus 2019.<br><br>P-ISSN: 2086-7662<br><br>E-ISSN: 2622-1950 |
| 3   | Wafa & Nugraeni (2018). Faktor-Faktor yang Mempenga-                                                                                                                                                      | Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit                                                                           | Variabel Independen: Pengalaman Pemerintah Menerapkan SAP,                                                                                                                                              | Hasil penelitian menyatakan Ukuran Pemerintah Daerah, Pengalaman                                                                                                                                                             | Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana (JRAMB), Volume 4,                                                                                    |

| (1) | (2)                                                                                                                      | (3)                                                                                                                                                                     | (4)                                                                                                                                                                                                                           | (5)                                                                                                                                                                                                                      | (6)                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ruhi <i>Audit Delay</i> Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia                                                     | Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i>                                                                                                                                   | Jumlah Temuan Audit<br><br>Periode Penelitian: Tahun 2015<br><br>Tempat Penelitian: Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia<br><br>Teknik Sampling: <i>Purposive Sampling</i><br><br>Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda | Pemerintah Menerapkan SAP, Jumlah Temuan Audit, Opini Audit berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> baik secara parsial maupun simultan.                                                                                 | Nomor 1, Mei 2018.<br><br>ISSN: 2460-1233                                                                        |
| 4   | Azhara <i>et al.</i> , (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Audit Delay</i> Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. | Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah<br><br>Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i><br><br>Teknik Sampling: Sampel Jenuh | Variabel Independen: Temuan Audit<br><br>Periode Penelitian: Tahun 2018-2022<br><br>Tempat Penelitian: Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera                                                                                  | Hasil penelitian menyatakan Temuan Audit dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Delay</i> . Sedangkan Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> . | Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2024.<br><br>P-ISSN: 2579-969X<br><br>E-ISSN: 2622-7940 |

| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                              | (3)                                                                                                                                               | (4)                                                                                                                                                                                        | (5)                                                                                                                                                                                                                                       | (6)                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
| 5   | Marlinda <i>et al.</i> , (2024). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Kinerja, dan Opini Audit terhadap <i>Audit Delay</i> pada Pemerintah Provinsi di Indonesia 2019-2022 | Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Opini Audit<br><br>Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i> | Variabel Independen: Akuntabilitas Kinerja<br><br>Periode Penelitian: 2019-2022<br><br>Tempat Penelitian: Pemerintah Provinsi di Indonesia<br><br>Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian menyatakan Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Akuntabilitas Kinerja berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> . Sedangkan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> . | Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Volume 2, Nomor 11, Tahun 2024.<br><br>ISSN: 3025-1192                       |
| 6   | Pambudi <i>et al.</i> , (2024). Opini Audit, Nilai Aset, Dan Kemandirian Daerah Sebagai Determinan <i>Audit Delay</i> : Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia 2018-2021                                            | Variabel Independen: Opini Audit, Nilai Aset (Ukuran Pemerintah Daerah)<br><br>Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i>                              | Variabel Independen: Kemandirian Daerah<br><br>Periode Penelitian: Tahun 2018-2021<br><br>Tempat Penelitian: Pemerintah Provinsi Di Indonesia                                              | Hasil penelitian menyatakan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> . Sedangkan Opini audit dan Kemandirian Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> .                         | JAKA: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Auditing, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2024, Halaman 429-437.<br><br>ISSN: 2723-2522 (Online) |

| (1) | (2)                                                                                                                                                | (3)                                                                                              | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (6)                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Fitriana & Hafini (2023). Pengaruh <i>Leverage</i> , Opini Audit, APBD terhadap <i>Audit Delay</i> pada Kabupaten/ Kota di Indonesia Bagian Tengah | Variabel Independen: Opini Audit<br><br>Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i>                    | Variabel Independen: <i>Leverage</i> , APBD<br><br>Periode Penelitian: Tahun 2020-2021<br><br>Tempat Penelitian: Seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur<br><br>Teknik Sampling: <i>Purposive Sampling</i><br><br>Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian menyatakan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> , sedangkan Opini Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> . Sementara itu, APBD tidak berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> . | Jurnal Ilmiah Multi Disiplin, Volume 2, Nomor 8, Juli 2023. ISSN: 2810-0581 ( <i>online</i> )                   |
| 8   | Vanesha & Syofyan, (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Opini Audit, dan Terpilihnya Kembali Kepala Daerah                                          | Variabel Independen: Ukuran Pemerintah, Opini Audit<br><br>Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i> | Variabel Independen: Terpilihnya Kembali Kepala Daerah Sebelumnya (Petahana)                                                                                                                                                                                                                              | Hasil penelitian menyatakan Ukuran Pemerintah dan Petahana/ incumbent tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> . Sedangkan                                                                                                                                               | Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Volume 2, Nomor 4, November 2020, Hal 3389-3404. ISSN: 2656-3649 ( <i>Online</i> ) |

| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                 | (3)                                                                           | (4)                                                                                                                                                                                                                                           | (5)                                                                                                                                                                                                                                 | (6)                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sebelumnya<br>(Petahana)<br>terhadap<br><i>Audit Delay</i><br>Pada<br>Pemerintah<br>Provinsi Di<br>Indonesia                                                                                                                        |                                                                               | Periode<br>Penelitian:<br>Tahun<br>2014-2018<br><br>Tempat<br>Penelitian:<br>Pemerintah<br>Provinsi di<br>Indonesia<br><br>Teknik<br>Analisis:<br>Regresi<br>Linier<br>Berganda                                                               | Opini Audit<br>berpengaruh<br>signifikan<br>terhadap <i>Audit<br/>Delay</i> .                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
| 9   | Bawono <i>et al.</i> , (2023).<br><i>Impact of Audit and Financial Factors on Impact of Audit and Financial Factors on Audit Report Lag: Evidences from Indonesian Audit Report Lag: Evidences from Indonesian Local Government</i> | Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Variabel Dependen: Audit Delay | Variabel Independen: Temuan Audit, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Auditor Switching</i><br><br>Periode Penelitian: 2017-2018<br><br>Tempat Penelitian: Pemerintah Daerah di Indonesia<br><br>Teknik Sampling: <i>Purposive Sampling</i> | Hasil penelitian menyatakan Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, dan <i>Leverage</i> secara empiris mempengaruhi <i>Audit Delay</i> . Sedangkan <i>Auditor Switching</i> dan Probabilitas tidak memengaruhi <i>Audit Delay</i> . | Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 8, Nomor 1, April 2023.<br><br>P-ISSN: 1411-6510<br><br>ISSN: 2541-6111 |

| (1) | (2)                                                                                                                                                                               | (3)                                                                                                     | (4)                                                                                                                                                              | (5)                                                                                                                                                                                                              | (6)                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         | Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| 10  | Dheva & Setya (2023). <i>The Effect of SKPD Complexity, Government Size, Budget Absorption, and Audit Opinion on Audit Delay in Central Java Province Government in 2017-2021</i> | Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit<br><br>Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i> | Variabel Independen: Kompleksitas SKPD, Penyerapan Anggaran<br><br>Periode Penelitian: Tahun 2017-2021<br><br>Tempat Penelitian: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Hasil penelitian menyatakan Kompleksitas SKPD, Penyerapan Anggaran, dan Opini Audit berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> . Sedangkan Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> . | The International Journal of Business Management and Technology, Volume 7, Issue 1, January-February 2023.<br><br>ISSN: 2581-3889 |
|     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         | Teknik Sampling: <i>Purposive Sampling</i>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         | Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| 11  | Siahaan & Pakuan (2024). <i>Local Government: Examining Factors Affecting Audit Report Lag.</i>                                                                                   | Variabel Independen: Opini Audit<br><br>Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i>                      | Variabel Independen: Temuan Audit, Latar Belakang Pendidikan, Keterampilan Professional, Pendidikan Professional                                                 | Hasil penelitian menyatakan Opini Audit, Latar Belakang Pendidikan, dan Pendidikan Profesional Berkelanjutan memiliki efek negatif yang signifikan                                                               | Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak, dan Informasi (JAKPI), Volume 4, Nomor 2, Desember 2024.                                       |

| (1) | (2)                                                                                                                                        | (3)                                                                       | (4)                                                                                                                                                                                                     | (5)                                                                                                                                                                                                                          | (6)                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                            |                                                                           | Berkelanjutan<br>Periode Penelitian:<br>Tahun 2014<br>Tempat Penelitian:<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi/<br>Kabupaten/<br>Kota di<br>Indonesia                                                        | terhadap <i>Audit Report Lag</i> .<br>Sedangkan Temuan Audit dan Keterampilan Profesional tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> .                                                                               | ISSN: 1412-3681 (cetak)<br>ISSN: 2442-4617 (online)                   |
|     |                                                                                                                                            |                                                                           | Teknik Sampling:<br><i>Purposive Sampling</i>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
|     |                                                                                                                                            |                                                                           | Teknik Analisis:<br>Regresi Linier Berganda                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
| 12  | Aprila & Siska (2017). Pengaruh Opini Audit dan Kualitas Auditor terhadap <i>Audit Delay</i> pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia. | Variabel Independen: Opini Audit<br>Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i> | Variabel Independen: Kualitas Audit yang diproksikan dengan Kecakapan Profesional dan Latar Belakang Pendidikan Akuntansi<br>Periode Penelitian: Tahun 2015<br>Tempat Penelitian: Pemerintah Kabupaten/ | Hasil penelitian menyatakan Opini Audit dan Kecakapan Profesional berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Delay</i> .<br>Sedangkan Latar Belakang Pendidikan Akuntansi tidak berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Delay</i> . | Jurnal Akuntansi, Volume 7, Nomor 3, Oktober 2017.<br>ISSN: 2303-0356 |

| (1) | (2)                                                                                                                                                           | (3)                                                                                                                                                                                   | (4)                                                                                                                                                                                                                  | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                           | (6)                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       | Kota di<br>Indonesia                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       | Teknik<br>Sampling:<br><i>Purposive<br/>Sampling</i>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       | Teknik<br>Analisis:<br>Regresi<br>Linier<br>Berganda                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
| 13  | Krisandri <i>et al.</i> , (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Audit Delay</i> di Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020 | Variabel Independen: Ukuran Pemerintah, Opini Audit, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah<br><br>Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i><br><br>Teknik Sampling: Sampel Jenuh/ Sensus | Variabel Independen: Temuan Audit, <i>Leverage</i><br><br>Periode Penelitian: Tahun 2016-2020<br><br>Tempat Penelitian: Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan<br><br>Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian menyatakan Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Opini Audit, dan <i>Leverage</i> tidak berdampak dan tidak signifikan pada <i>Audit Delay</i> . Sedangkan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berdampak dan tidak signifikan pada <i>Audit Delay</i> . | COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting, Volume 6, Nomor 2, Januari-Juni 2023.<br><br>E-ISSN: 2597-5234 |
| 14  | Petrisia <i>et al.</i> , (2024). <i>The Phenomenon of Government Audit Delay in Indonesia</i> .                                                               | Variabel Independen: Ukuran Pemerintah<br><br>Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i>                                                                                                   | Variabel Independen: Temuan Audit, Jumlah Entitas Akuntansi                                                                                                                                                          | Hasil penelitian menyatakan secara parsial, Ukuran Pemerintah berpengaruh negatif signifikan                                                                                                                                                                                  | Finance, Accounting and Business Analysis, Volume 6, Issue 1,                                                         |

| (1) | (2)                                                                                                                                                               | (3)                                                                                                                                        | (4)                                                                                                                                                                                       | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (6)                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | Periode Penelitian: Tahun 2019-2021                                                                                                                                                       | terhadap <i>Audit Delay</i> . Sedangkan Temuan Audit dan Jumlah Entitas Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> . Semetara itu, secara simultan Ukuran Pemerintah, Temuan Audit, dan Jumlah Entitas Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> . | Tahun 2024.<br><br>ISSN: 2603-5324                                                   |
| 15  | Gemilang & Pramita (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat, Ketergantungan Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Temuan Audit terhadap <i>Audit Delay</i> | Variabel Independen: Ukuran Pemerintah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Opini Audit<br><br>Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i> | Variabel Independen: Temuan Audit<br><br>Periode Penelitian: Tahun 2015-2019<br><br>Tempat Penelitian: pemerintah provinsi di Indonesia<br><br>Teknik Sampling: <i>Purposive Sampling</i> | Hasil penelitian menyatakan Ukuran Pemerintah dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> . Sedangkan Opini Audit dan Temuan Audit berpengaruh positif terhadap <i>Audit Delay</i> .                                                                    | Borobudur Accounting Review, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2021.<br><br>E-ISSN: 2798-5237 |

| (1) | (2)                                                                                                                                       | (3)                                                                                                                                                  | (4)                                                                                                                                                                                                     | (5)                                                                                                                                                                                                                              | (6)                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| 16  | Karlina <i>et al.</i> , (2018). <i>Determinant Analysis Of Audit Report Lag In Regional Government In Indonesia.</i>                      | Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit<br><br>Variabel Independen: <i>Audit Delay</i><br><br>Teknik Analisis: Regresi Data Panel | Variabel Independen: Umur Pemerintah Daerah, Petahana, Temuan Audit, DAK<br><br>Periode Penelitian: Tahun 2013-2015<br><br>Tempat Penelitian: Seluruh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Indonesia | Hasil penelitian menyatakan Ukuran Pemerintah Daerah, Petahana, Opini Audit, dan DAK tidak mempengaruhi <i>Audit Report Lag</i> .<br><br>Sedangkan Umur Pemerintah Daerah dan Temuan Audit memengaruhi <i>Audit Report Lag</i> . | Jurnal Internasional Penelitian Ilmiah dan Teknologi, Volume 7, Edisi 4, April 2018.<br><br>ISSN: 2277-8616 |
| 17  | Afriani & Satyawati (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Audit Delay</i> pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2016-2018 | Variabel Independen: Opini Audit<br>Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i>                                                                            | Variabel Independen: Akuntabilitas Kinerja, Tipe Pemerintah<br><br>Periode Penelitian: Tahun 2016-2018<br><br>Tempat Penelitian: Seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia                                   | Hasil penelitian menyatakan Akuntabilitas Kinerja dan Tipe Pemerintahan menunjukkan pengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> .<br><br>Sedangkan Opini Auditor tidak ditemukan adanya pengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> .          | AKUNESA : Jurnal Akuntansi Unesa, Volume 11, Nomor 2, Januari 2023.<br><br>ISSN: 2302-1195                  |

| (1) | (2)                                                                                                                                                               | (3)                                                                                            | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (6)                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                | Teknik<br>Sampling:<br><i>Purposive<br/>Sampling</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                | Teknik<br>Analisis:<br>Regresi<br>Linier<br>Berganda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |
| 18  | Ramadhani<br>(2022).<br>Analisis<br>Faktor-<br>Faktor yang<br>Mempenga-<br>ruhi <i>Audit<br/>Delay</i> pada<br>Pemerinta-<br>han Provinsi<br>Sumatera<br>Selatan. | Variabel<br>Independen:<br>Ukuran<br>Pemerintah<br>Variabel<br>Dependen:<br><i>Audit Delay</i> | Variabel<br>Independen:<br>Tingkat<br>Kemandiri-<br>an Daerah,<br>Temuan<br>Audit,<br>Terpilihnya<br>Kembali<br>Kepala<br>Daerah,<br><i>Leverage</i><br><br>Periode<br>Penelitian:<br>Tahun<br>2018-2020<br><br>Tempat<br>Penelitian:<br>Provinsi<br>Sumatera<br>Selatan<br><br>Teknik<br>Sampling:<br><i>Cluster<br/>Sampling</i><br><br>Teknik<br>Analisis:<br>Regresi<br>Linier<br>Berganda | Hasil penelitian<br>menyatakan<br>Ukuran<br>Pemerintah,<br>Tingkat<br>Kemandirian<br>Daerah,<br>Temuan Audit,<br>Terpilihnya<br>Kembali<br>Kepala Daerah,<br>dan <i>Leverage</i><br>secara simultan<br>tidak<br>berpengaruh<br>terhadap <i>Audit<br/>Delay</i> .<br>Sementara itu,<br>secara parsial<br>Tingkat<br>Kemandirian<br>Daerah<br>berpengaruh<br>signifikan<br>terhadap <i>Audit<br/>Delay</i> ,<br>sedangkan<br>Ukuran<br>Pemerintah,<br>Temuan Audit,<br>Terpilihnya<br>Kembali<br>Kepala Daerah,<br>dan <i>Leverage</i><br>tidak | COMSER-<br>VA: Jurnal<br>Penelitian<br>dan<br>Pengabdian<br>Masyarakat<br>, Volume 2,<br>Nomor 07,<br>November<br>2022.<br>E-ISSN:<br>2798-5210<br>P-ISSN:<br>2798-5652 |

| (1) | (2)                                                                                            | (3)                                                                                    | (4)                                                                                                                                                                                                                                                               | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (6)                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |
| 19  | Aulia & Fithri (2025). <i>Linking Accountability to Audit Delay: Role of Size dan Findings</i> | Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah<br>Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i> | Variabel Independen: Temuan Audit<br>Variabel Mediasi: Akuntabilitas Kinerja<br>Periode Penelitian: Tahun 2021-2023<br>Tempat Penelitian: Seluruh Provinsi di Indonesia<br>Teknik Sampling: <i>Purposive Sampling</i><br>Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian menyatakan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja dan Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja. Sementara itu, Temuan Audit berpengaruh positif terhadap <i>Audit Delay</i> , sedangkan Ukuran Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> serta Akuntabilitas Kinerja tidak memediasi hubungan antara Ukuran Pemerintah Daerah dan Temuan Audit terhadap <i>Audit Delay</i> . | Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis, Volume 7, Nomor 2, September 2025.<br>E-ISSN: 2656-7113<br>P-ISSN: 2797-4057 |
| 20  | Laili <i>et al.</i> , (2023). Pengaruh                                                         | Variabel Independen:                                                                   | Variabel Dependen:                                                                                                                                                                                                                                                | Hasil penelitian menyatakan Ukuran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Manaje-<br>ment<br>Studies &                                                                                                       |

| (1)                                                                                                                                                                                                                         | (2)                                                                                                    | (3)                                                                                      | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (5)                                                                                                                  | (6)                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             | Ukuran<br>Perusahaan,<br>Opini<br>Auditor, dan<br>Umur<br>Perusahaan<br>terhadap<br><i>Audit Delay</i> | Ukuran<br>Perusahaan,<br>Opini<br>Auditor<br>Variabel<br>Dependen:<br><i>Audit Delay</i> | Umur<br>Perusahaan<br>Periode<br>Penelitian:<br>Tahun<br>2014-2018<br><br>Tempat<br>Penelitian:<br>Perusahaan<br>Sub-Sektor<br>Manufaktur<br>Industri<br>Barang<br>Konsumsi<br><br>Teknik<br>Sampling:<br><i>Purposive<br/>Sampling</i><br><br>Teknik<br>Analisis:<br>Regresi<br>Linier<br>Berganda | Perusahaan,<br>Opini Auditor,<br>dan Umur<br>Perusahaan<br>tidak<br>berpengaruh<br>terhadap <i>Audit<br/>Delay</i> . | Entrepre-<br>neurship<br>Journal,<br>Volume 4,<br>Nomor 6,<br>Tahun<br>2023.<br><br>ISSN:<br>8712-8720 |
| Siti Marwah (2025) <b>Pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Government Size, dan Opini Audit terhadap Audit Delay</b> (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024) |                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                        |

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan proses pemeriksaan audit akan memunculkan jarak waktu antara berakhirnya periode akuntansi sampai pada diterbitkannya laporan auditor. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai *audit delay* (Tullah et al., 2019). Dalam sektor pemerintah, ketepatan waktu laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pengambilan keputusan (Wafa & Nugraeni, 2018). Oleh karena itu, auditor diharapkan dapat meminimalkan terjadinya *audit delay*

untuk memenuhi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa peraturan yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011. yang menjelaskan periode untuk menyerahkan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran. Hal ini karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat memengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan mengurangi nilai dari informasi tersebut (Vanesha & Syofyan, 2020).

Teori yang menjadi dasar penelitian ini adalah teori agensi (*Agency Theory*) yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori keagenan merupakan sebuah konsep yang menggambarkan keterkaitan konseptual antara principal (pihak yang memberi wewenang) dan agen (pihak yang menerima wewenang) dalam suatu organisasi. Dalam konteks sektor publik, masyarakat dan pemerintah pusat merupakan principal yang memberikan wewenang kepada agen yaitu pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya publik, termasuk dana transfer dari pemerintah pusat dan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkannya melalui laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh BPK. Hubungan keagenan ini berpotensi menimbulkan konflik, dimana pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih lengkap terkait kondisi keuangan dan aktivitas operasionalnya dibandingkan dengan pemerintah pusat dan masyarakat yang menyebabkan adanya

ketimpangan informasi. Kondisi ini disebut asimetri informasi. Terjadinya asimetri informasi memberikan peluang kepada agen untuk bertindak tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan principal.

Dengan demikian, untuk mengurangi terjadinya konflik keagenan dan asimetri informasi, maka diperlukan mekanisme pengawasan dan kontrol eksternal, yang dapat dilakukan melalui audit eksternal oleh BPK. Tujuan dilakukannya audit adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Lamanya proses audit dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana hubungan keagenan dapat berjalan secara efisien.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi *audit delay* adalah tingkat ketergantungan keuangan daerah. Tingkat ketergantungan keuangan daerah mencerminkan seberapa besar pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan daerahnya (Gemilang & Pramita, 2021). Pengukurannya dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah pendapatan transfer yang didapat dari pemerintah pusat dengan total pendapatan daerah yang dimiliki pemerintah daerah (Tullah et al., 2019). Suatu daerah yang memiliki tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi akan mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah pusat. Kondisi ini akan mendorong pemerintah daerah untuk mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah pusat, termasuk terkait dengan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Selain itu, adanya pemberian sanksi dari pemerintah pusat berupa penundaan pemberian bantuan bagi pemerintah daerah yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya juga

memperkuat dorongan pemerintah daerah untuk tunduk terhadap peraturan pemerintah pusat. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat ketergantungan keuangan daerah, maka akan semakin besar juga tekanan kepatuhan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, yang pada akhirnya dapat mendorong penyelesaian audit menjadi lebih cepat dan mengurangi terjadinya *audit delay*.

Beberapa penelitian juga mendukung pandangan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap *audit delay* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Azhara *et al.*, (2024), Tullah *et al.*, (2019), dan Marlinda *et al.*, (2024). Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gemilang & Pramita, (2021) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Dalam penelitiannya menyebutkan jika tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi tidak selalu dapat menyebabkan terjadinya *audit delay*. Hal ini karena setiap pemerintah daerah akan memiliki kesadaran yang sama terhadap kewajibannya untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Selain itu, auditor juga akan menerapkan profesionalisme dalam melakukan proses audit. Penelitian ini juga didukung oleh peneliti lainnya yaitu Karlina *et al.*, (2018) yang menyatakan pendapat yang sama.

Selanjutnya, *government size* atau ukuran pemerintah daerah juga menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi *audit delay*. Ukuran pemerintah daerah adalah gambaran mengenai besar kecilnya pemerintah daerah yang dapat diukur melalui total aset, jumlah karyawan, total pendapatan, dan juga tingkat

produktivitas (Banunaek *et al.*, 2022). Dalam penelitian ini, ukuran pemerintah daerah diukur dengan total aset yang dimiliki. Aset yang semakin besar pada pemerintah daerah akan menyebabkan jumlah transaksi yang semakin banyak dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki aset lebih sedikit (Vanesha & Syofyan, 2020). Kondisi ini akan menyebabkan waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan menjadi semakin lama dan berpotensi mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan, yang pada akhirnya akan mengakibatkan terjadi *audit delay*. Teori agensi juga menyoroti hal tersebut, dimana semakin kompleks transaksi dan kegiatan operasional pemerintah daerah, akan meningkatkan risiko asimetri informasi antara agen yang dalam hal ini pemerintah daerah dan principal yaitu pemerintah pusat dan masyarakat.

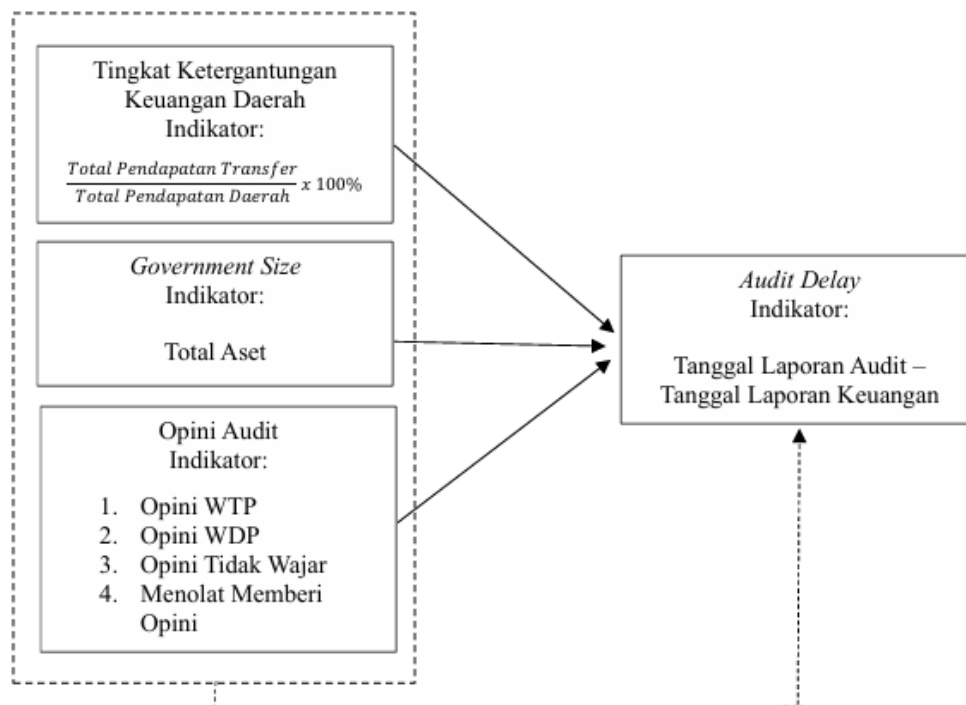
Beberapa penelitian juga mendukung pandangan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *audit delay* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Satiman *et al.*, (2024) dan Pambudi *et al.*, (2024). Sedangkan, penelitian yang dilakukan Bawono *et al.*, (2023) menyatakan ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Hafini, (2023), (Gemilang & Pramita, 2021), dan (Tullah *et al.*, 2019) menyatakan jika ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Artinya, ukuran pemerintah daerah tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur terjadinya *audit delay*. Pemerintah daerah yang memiliki aset besar maupun kecil akan memiliki tuntutan yang sama untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu kepada BPK.

Selain kedua faktor diatas, opini audit juga berperan penting dalam memengaruhi *audit delay*. Dalam kerangka teori agensi, opini audit digunakan sebagai mekanisme pengawasan eksternal atas perilaku agen. Dengan demikian, ketika agen mendapatkan *modified opinion* yang menggambarkan adanya permasalahan material dalam penyajian laporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian internal, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, agen cenderung melakukan *moral hazard* dengan mencoba menutupi atau memperlambat pengungkapan informasi tersebut kepada auditor (Khoufi & Khoufi, 2018). Namun, disisi lain ketika auditor mengindikasikan adanya kelemahan material dalam pengendalian internal atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka auditor harus memperluas ruang lingkup pengujian, menambah sampel bukti, dan melakukan konfirmasi yang lebih mendalam atas temuan-temuan tersebut. Berdasarkan teori agensi, hal ini berpotensi meningkatkan biaya pengawasan (*monitoring cost*) dalam bentuk alokasi waktu yang lebih banyak. Oleh karena itu, semakin buruk opini yang diterima, maka waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan akan semakin lama, sehingga menambah *audit delay* (Gemilang & Pramita, 2021).

Beberapa penelitian juga mendukung pandangan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gemilang & Pramita, (2021) dan Khoufi & Khoufi, (2018). Namun, beberapa penelitian yang dilakukan oleh Satiman *et al.*, (2024), Afriani & Satyawan, (2023), dan Marlinda *et al.*, (2024) menyatakan jika opini audit tidak berpengaruh terhadap

*audit delay*. Hal ini dikarenakan opini audit merupakan hasil akhir dari sebuah proses audit dan bukan faktor yang dapat memengaruhi lamanya proses audit.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:



Keterangan:

Secara Parsial : \_\_\_\_\_

Secara Simultan : - - - - -

**Gambar 2. 1**

**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, adapun hipotesis yang akan dikembangkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, *Government Size*, dan Opini Audit secara simultan berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
2. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
3. *Government Size* secara parsial berpengaruh positif terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
4. Opini Audit secara parsial berpengaruh positif terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.